

RENCANA STRATEGIS 2016 - 2021



**BADAN KESBANGPOL
KOTA TANGERANG SELATAN**

KESBANGPOL

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat Karunia dan Ridho-Nya, sehingga Revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahap I Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2016-2021) Tahun Anggaran 2017 telah tersusun.

Dokumen Revisi Renstra ini disusun berdasarkan hasil Reviu Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 dan sebagai bentuk implementasi dari Tugas pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan, yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 dengan mempedomani pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program, kegiatan serta indikasi pendanaan pembangunan adalah satu kesatuan dan/atau tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021.

Akhirnya, besar harapan dan optimis kami agar Renstra ini menjadi acuan dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk meningkatkan kinerja pada setiap lini.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Tangerang Selatan, Juni 2017

**KEPALA KESBANGPOL
KOTA TANGERANG SELATAN**


AZHAR SYAM'UN R., AP., M.Si
NIP. 19730829 199311 1 001



- d. Perlunya memiliki sistem pelayanan masyarakat dalam memperoleh SKT (Surat Keterangan Terdaftar) sebagai organisasi massa, berbasis *online*;
- e. Perlunya memiliki sistem pelayanan masyarakat dalam mendapatkan SIP (Surat Ijin Penelitian/*Research*) yang berbasis Teknologi Informasi, dengan tetap menjaga kewaspadaan terhadap obyek dan hasil penelitian dalam konteks inteligen;
- f. Perlunya membuat strategi dan program yang terkait dengan ketahanan ideologi/ekonomi/sosial budaya/agama/ politik, dsb, yang dapat mengancam ketahanan bangsa dan Negara (NKRI).
- g. Perlunya membuat modul-modul/iklan layanan masyarakat dalam peningkatan rasa cinta tanah air dan belanegara;
- h. Perlunya intensifikasi diseminasi informasi terkait dengan penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam 4 (empat) konsensus bangsa (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika);

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota/Wakil Walikota Tangsel Terpilih

3.2.1 Visi, Misi dan Program Kerja Walikota/Wakil Walikota 2010 - 2015

Sebagai bahan komparasi, dan sekaligus sebagai basis fundamental dalam penentuan RPJMD periode 2016-2021, tentu saja data dan informasi terkait dengan RPJMD periode 2011-2016 (periode sebelumnya) perlu ditampilkan agar menjadi landasan dan sumber pengembangan (*improvement*) dan peningkatan kinerja untuk periode selanjutnya.

- d. Perlunya memiliki sistem pelayanan masyarakat dalam memperoleh SKT (Surat Keterangan Terdaftar) sebagai organisasi massa, berbasis *online*;
- e. Perlunya memiliki sistem pelayanan masyarakat dalam mendapatkan SIP (Surat Ijin Penelitian/*Research*) yang berbasis Teknologi Informasi, dengan tetap menjaga kewaspadaan terhadap obyek dan hasil penelitian dalam konteks intelijen;
- f. Perlunya membuat strategi dan program yang terkait dengan ketahanan ideologi/ekonomi/sosial budaya/agama/ politik, dsb, yang dapat mengancam ketahanan bangsa dan Negara (NKRI).
- g. Perlunya membuat modul-modul/iklan layanan masyarakat dalam peningkatan rasa cinta tanah air dan belanegara;
- h. Perlunya intensifikasi diseminasi informasi terkait dengan penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam 4 (empat) konsensus bangsa (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika);

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota/Wakil Walikota Tangsel Terpilih

3.2.1 Visi, Misi dan Program Kerja Walikota/Wakil Walikota 2010 - 2015

Sebagai bahan komparasi, dan sekaligus sebagai basis fundamental dalam penentuan RPJMD periode 2016-2021, tentu saja data dan informasi terkait dengan RPJMD periode 2011-2016 (periode sebelumnya) perlu ditampilkan agar menjadi landasan dan sumber pengembangan (*improvement*) dan peningkatan kinerja untuk periode selanjutnya.

Sebagai data historis, akan banyak memberi gambaran perjalanan kemajuan (progress) pembangunan, baik yang berjalan secara linear maupun melalui lompatan-lompatan pembangunan sebagai hasil pengembangan kreatifitas dan inovasi, baik dalam proses perencanaan maupun dalam proses pelaksanaannya.

Adapun yang menjadi VISI dan MISI Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan periode 2011-2016 adalah sbb:

VISI : “Terwujudnya kota Tangerang Selatan yang Mandiri Damai dan Asri”

Dengan menetapkan MISI sbb.:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat;
2. Meningkatkan keharmonisan fungsi ruang kota yang berwawasan lingkungan;
3. Menata sistem sarana dan prasarana dasar perkotaan;
4. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masyarakat;
5. Meningkatkan fungsi dan peran kota sebagai sentra perdagangan dan jasa;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Penetapan VISI dan MISI tersebut diarahkan untuk menjawab permasalahan pokok daerah pada saat itu, yang diidentifikasi sbb.:

1. Tingkat pendidikan yang belum optimal;
2. Pertumbuhan ekonomi belum meningkatkan daya beli;
3. Layanan kesehatan masih tergolong mahal;
4. Perumahan layak huni belum menjangkau masyarakat luas;
5. Jaringan dan kualitas jalan belum mendukung fungsi kota;
6. Lingkungan perkotaan belum tertata dengan baik;
7. Pelayanan publik yang belum optimal.

Dengan isu strategis daerah yang ada berupa :

1. Kemiskinan dan Pengangguran;
2. Sumber Daya Manusia;
3. Perekonomian daerah;
4. Infrastruktur dasar dan Kawasan Perkotaan;
5. Tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan permasalahan pokok dan isu strategis tersebut, kemudian ditetapkan prioritas pembangunan daerah, sbb.:

1. Penataan Sarana dan Prasarana Infrastruktur;
2. Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan;
3. Pemantapan Akses Pelayanan Kesehatan;
4. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
5. Pengembangan Produk dan Jasa Unggulan Daerah;
6. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem dan Teknologi.

Untuk sampai pada tataran aplikasi dari perencanaan pembangunan daerah yang sudah termuat dalam VISI, MISI, Program Kepala Daerah/wakilKepala daerah tersebut, kemudian Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi bagian dari struktur pemerintahan kota Tangerang Selatan, telah menetapkan strategi, program, kebijakan dan kegiatan untuk mendukung RPJMD (2011-2016) tersebut, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
4. Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Kenyamanan Lingkungan;

3.2.2 Visi, Misi dan Program Kerja Walikota/Wakil Walikota 2016 - 2021

Walikota Tangerang Selatan periode 2016-2021 adalah merupakan walikota yang memenangkan pesta demokrasi tingkat lokal pada pesta demokrasi yang secara nasional diselenggarakan serentak, dimana posisi walikota pada saat mengikuti kontestasi adalah sebagai incumbent.

Dengan terpilihnya kembali incumbent pada periode kepemimpinan daerah kedua kalinya menyiratkan faktor keberuntungan dalam perspektif perencanaan pembangunan, karena didalamnya terdapat modalitas dalam mengenali proses pencapaian kinerja dan segala sesuatu yang telah dicapai pada pembangunan periode terdahulu, untuk selanjutnya dilanjutkan secara *increamental* dalam upaya mencapai optimalisasi pelayanan public sebagai kewajiban (*obligation*) pemerintah daerah.

Keuntungan lain yang melekat dalam posisi incumbent adalah bahwa proses-proses pembangunan terdahulu telah menyajikan hambatan dan kendala (*constraint*) yang dapat diidentifikasi untuk diformulasikan strategi pemecahan dan penanganannya.

Dalam menjalankan mandat untuk memimpin kota Tangerang Selatan pada periode 2016-2021, sebagai langkah awal adalah menentukan arah dan panduan pembangunan kota Tangerang Selatan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) agar arah dan tujuan pembangunan dapat terwujud melalui perumusan VISI dan MISI untuk selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program, strategi, kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan.

VISI Walikota Tangerang Selatan untuk periode 2016-2021 adalah sbb.:

“TERWUJUDNYA TANGERANG SELATAN KOTA CERDAS, BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING BERBASIS TEKNOLOGI DAN INOVASI”

Dengan mewujudkan MISI, sbb.:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional;
3. Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
4. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan;
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan VISI dan MISI Walikota dan Wakil Walikota tersebut, kemudian dibuat indikasi isu-isu strategis untuk tahun 2016-2021, yaitu :

Kualitas Sumber Daya Manusia

Meskipun IPM (77) relatif lebih baik dari kabupaten/kota lain di propinsi Banten, namun Angka Melek Huruf (AMH), dan Indeks Kemampuan Daya Beli/Purchasing Power Parity (PPP) kota Tangerang Selatan masih perlu ditingkatkan dibanding nasional, agar daya saing daerah meningkat.

Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk (3-4%) dengan kepadatan penduduk (9.806 jiwa/km²) dengan jumlah komposisi pria lebih tinggi dibanding wanita, menjadi tantangan tersendiri terhadap masalah social, migrasi penduduk, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Sarana dan Prasarana Wilayah

Aksesibilitas orang, barang dan jasa masih membutuhkan peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana wilayah apalagi sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah

3. Pemeliharaan dan peningkatan penyediaan *Prasarana dan Sarana Kota*;
4. Pembangunan kualitas dan kompetensi *Sumber Daya Manusia*;
5. Peningkatan pertumbuhan perekonomian melalui pengembangan sektor *Jasa Unggulan*;
6. Penanggulangan *Kemiskinan, Pengangguran, dan peningkatan Kesejahteraan Sosial*;

Untuk merealisasikan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka untuk **Prioritas Pembangunan pada tahun 2017 :**

1. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM;
2. Pengembangan Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
3. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan;
4. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
5. Pemantapan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Teknologi dan Inovasi;

Selanjutnya Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang merupakan subsistem dari sistem pemerintahan kota Tangerang Selatan, mengkonkritkan rencana besar tersebut dalam bentuk program kerja dan kegiatan untuk menunjang tercapainya tujuan pembangunan kota, yaitu dalam bentuk program dan kegiatan sbb.:

1. Program Pendidikan politik masyarakat.
2. Program Pengembangan Wawasan kebangsaan.
3. Program Peningkatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan.
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya

7. Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran.

3.3 Telaahan Renstra Provinsi, Kementerian/Lembaga

Untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kota terhadap sasaran Renstra Kementerian/lembaga, dan SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi wewenang tugas dan fungsi masing-masing SKPD perlu dilakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian/lembaga, dan Renstra Provinsi.

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga/Provinsi merupakan upaya untuk penyamaan persepsi tentang pembangunan Indonesia yang sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa, yaitu antara program pembangunan di daerah dengan program pembangunan yang ada di tingkat provinsi dan kota.

Hal ini sesuai dengan substansi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) disusun dengan berpedoman pada program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan pemahaman secara utuh tentang prinsip desentralisasi, dimana di dalam undang-undang tersebut di atas, ditegaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahaan urusan pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan asas otonom, yaitu prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana harus dipahami bahwa kewenangan yang diperolehnya ialah merupakan urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat, diluar bidang Moneter dan Fiskal Nasional, Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Yustisi dan Agama.

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Kesbangpol berkedudukan sebagai unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dirjen Kesbangpol mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Perumusan norma, standar dan prosedur dibidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang kesatuan bangsa dan politik;
5. Pelaksanaan administrasi Dirjen Kesbang dan politik;

Ada 7 (tujuh) program yang terdapat dalam Renstra Dirjen Kesbangpol-Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

1. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 2. Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 3. Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri;
 4. Program Ketahanan Ekonomi;
 5. Program Kewaspadaan Nasional;
 6. Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 7. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
- Dirjen Kesbangpol.

Sedangkan program yang terdapat dalam Renstra Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan, adalah :

1. Program Pendidikan politik masyarakat
2. Program Pengembangan Wawasan kebangsaan
3. Program Peningkatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan

dikatakan bahwa terdapat sinergitas dan keterpaduan antara Renstra K/L dengan Renstra Kesbangpol Tangerang Selatan, khususnya dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta upaya berkesinambungan untuk mempertahankan NKRI dari berbagai ancaman dan gangguan, baik yang sifatnya fisik maupun yang bersifat non-fisik (pemikiran/ideologi);

Terdapat kesamaan pandangan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap kali proses demokrasi dilaksanakan, apakah pada level nasional, maupun lokal;

Dalam menangkal paham radikal dan ancaman terorisme, juga diperoleh suatu program dan pandangan yang sama untuk menangkalnya melalui bentuk yang bersifat preemtif, preventif, cegah dini, deteksi dini dan lapor cepat melalui pembentukan organ-organ yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menangani ancaman aktual kehidupan berbangsa.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terdapat kesamaan pola dalam pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan (NGO, OKP, Ormas, Organisasi kewanitaan) yaitu melalui pemberdayaan dalam pembangunan nasional/kota melalui forum-forum dialog, seminar, dan forum kajian.

Untuk mendukung program-program tersebut di atas, antara K/L dan kota bersepaham untuk memanfaatkan berkah teknologi, yaitu melalui pemanfaatan Teknologi dan Informasi dengan implementasi berupa penyusunan database yang terkomputerisasi, dan layanan masyarakat secara online.

Khusus mengenai program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan yang menjadi salah satu program unggulan yang ada di K/L, saat ini program secara spesifik belum muncul di kota Tangerang Selatan (khususnya Kesbangpol), tetapi kegiatan-kegiatan yang mengarah pada persoalan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan,